

PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Januarto Wibowo, S.ST, MM
Kepala Bagian Umum
BPS Provinsi Sumatera Barat

Sawahlunto, 18 Maret 2021



Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Statistik

- ✓ UU No 16 / 1997 tentang Statistik
- ✓ PP No 51 / 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- ✓ Kepka BPS No 5 / 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- ✓ Kepka BPS No 6 / 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- ✓ Kepka BPS No 7 / 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- ✓ Perka BPS No 9 / 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
- ✓ UU No 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ✓ PMDN No 86 / 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah → **Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Statistik berupa integrasi sistem, buku DDA dan buku PDRB**
- ✓ Perpres No 39 / 2019 tentang Satu Data Indonesia
- ✓ Perka BPS No 4 / 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Oleh Pemerintah Daerah
- ✓ PMDN No 18 / 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah → **Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan statistik berupa profil daerah, survei, kompilasi, rekomendasi, dan metadata**



PENDAHULUAN

Kondisi Saat Ini

- ✓ Mekanisme koordinasi tidak jelas dan tidak optimal
- ✓ Data tersebar, bervariasi, dan akses terbatas
- ✓ *Data Quality Assurance* dan harmonisasi data belum berjalan
- ✓ Keterbatasan regulasi dalam definisi walidata

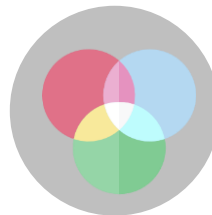
Sudut Pandang



Proses

Alur data dan tata kelola data **sesuai dengan Sistem Statistik Nasional (SSN)**

-
- ✓ Data tidak konsisten, tersebar, dan redundan
 - ✓ Data tidak dilengkapi metadata
 - ✓ Format metadata tidak baku
 - ✓ Diseminasi data belum disajikan sepenuhnya



Produk

Data memiliki metadata yang melekat dan terdokumentasi berdasarkan format dan struktur metadata yang baku



Kondisi Saat Ini

Sudut Pandang

Kondisi Ideal

- ✓ Tidak menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama, dan disepakati berdasarkan konsensus (forum satu data)



Produsen

Menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama, dan disepakati berdasarkan konsensus **(forum satu data)**

- ✓ Sering terjadi debat tentang data, bukan tentang substansi kebijakan publik
- ✓ Data belum dianggap penting
- ✓ Kepercayaan rendah dan koordinasi kurang baik

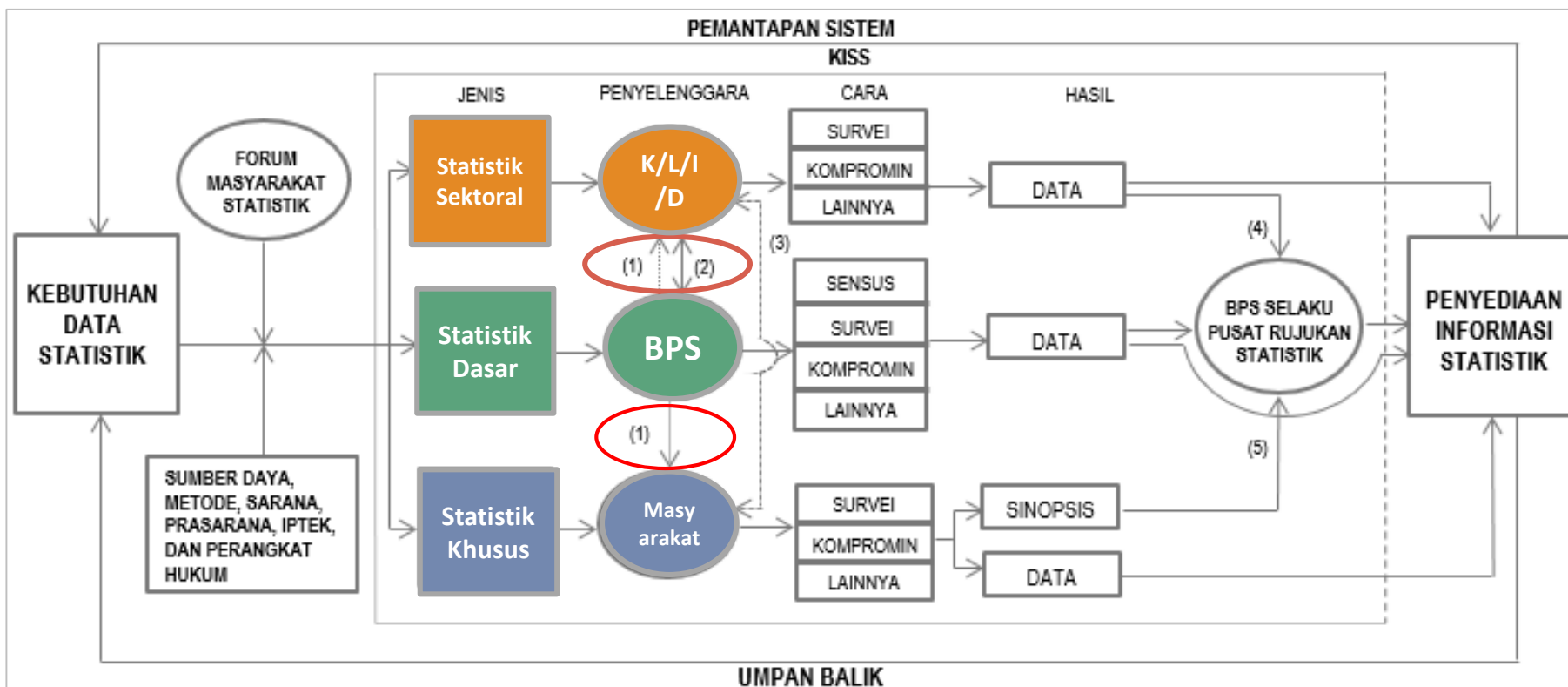


Pengguna

Data tersedia, dimutakhirkan, dan dapat diakses luas secara cuma-cuma dalam format satu data yang **mudah untuk digunakan oleh pengguna**



Sistem Statistik Nasional



KETERANGAN:

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Bab IX Pembinaan

**BPS mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan statistik**

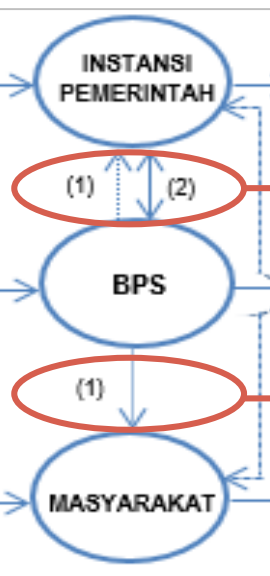
Pasal 31

Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- mengembangkan statistik sebagai ilmu;
- meningkatkan penguasaan iptek yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- mengembangkan sistem informasi statistik;
- meningkatkan penyebaran informasi statistik;
- meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan
- meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 32





Keterkaitan 2 (dua) Undang-Undang

UU 16 / 1997 Tentang Statistik



BPS adalah penyelenggara
Statistik Dasar
(Pasal 11 ayat 1)

Instansi pemerintah adalah
penyelenggara Statistik Sektoral
(Pasal 12 ayat 1)



UU 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Statistik merupakan
urusan pemerintahan
konkuren wajib non
pelayanan dasar
(Pasal 12 ayat 2n)



Keterkaitan 2 (dua) Peraturan Pemerintah

**PP 51 / 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik
(Turunan UU 16 / 1997)**

BPS adalah penyelenggara
Statistik Dasar
(Pasal 2 ayat 2)

Instansi pemerintah adalah
penyelenggara Statistik Sektoral
sesuai Tupoksinya
(Pasal 23 ayat 1)

Instansi penyelenggara **Survei Statistik
Sektoral wajib memberitahukan
kegiatannya dan mengikuti
rekomendasi**
(Pasal 22 ayat 2ab)



**PP 18 / 2016 tentang
Perangkat Daerah
(Turunan UU 23 / 2014)**

Dibentuk Organisasi Statistik
Sektoral di Prov/Kab/Kota

BPS merupakan lembaga yang
berwenang atas urusan statistik
(Persandian oleh Lemsaneg;
Informatika oleh
Kemenkominfo)

Statistik satu rumpun
dengan Persandian maupun
dengan Informatika
(Pasal 18 ayat 4e dan Pasal
37 ayat 4n)



Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
(penjelasan pasal 2)

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh keterbandingan hasil
(pasal 11)



Kegiatan Statistik

berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 1

Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional

Cara Pengumpulan Data	Penjelasan
Sensus	Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu
Survei	Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu
Kompilasi Produk Administrasi	Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat



Tiga Jenis Statistik

berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

Jenis	Penjelasan	Penyelenggara
Statistik Dasar	• Untuk keperluan yang bersifat luas • Dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat • Ciri-ciri: lintas sektoral, berskala nasional, makro	BPS
Statistik Sektoral	• Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut	Intansi pemerintah, mandiri atau bersama dengan BPS
Statistik Khusus	• Dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain	Lembaga, organisasi, perorangan, unsur masyarakat lainnya.



Siklus Kegiatan Sensus dan Survei BPS

sirusa.bps.go.id
bps.go.id
sumbar.bps.go.id

 **SENSUS
PENDUDUK**
sp2010.bps.go.id

 **Sensus
Penduduk
2020**



Identifikasi Statistik Sektor Pemerintah Daerah

1. Lokus (OPD provinsi/kab/kota) pelaksanaan kegiatan survei dan atau kompilasi statistik;
2. Jumlah personil pengelola statistik;
3. Keberadaan infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan survei dan atau kompilasi statistik;
4. Keberadaan survei dan atau kompilasi statistik yang dilakukan;
5. Keberadaan survei dan atau kompilasi statistik yang yang mendapatkan rekomendasi dari BPS;
6. Keberadaan metadata kegiatan, metadata indikator dan metadata variabel dalam survei dan atau kompilasi statistik.



Milestone Capacity Building

1. Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral (jenis dan GSBPM);
2. Pembentukan Forum Satu Data;
3. Sosialisasi Forum Satu Data (kaidah Bagi Pakai Data, Satu Metadata, Satu Kode Referensi, dan Satu Standar Data);
4. *Knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) kegiatan dan indikator statistik;
5. Melakukan pembentukan *Liaison Officer* (LO);
6. *Coaching Clinic* (bimbingan pengetahuan) penyusunan kegiatan dan indikator statistik;
7. Penyusunan Aplikasi Sistem Satu Data (*backend dan frontend interface*);
8. *Training Operator* (TO) aplikasi Sistem Satu Data;
9. Input Data dan Metadata.



Gantt Chart Project Planner

Internal BPS

1. Pembentukan Tim SDI dan Rekomendasi

- 1.1 Pembuatan rancangan tim
- 1.2 Pembahasan tim
- 1.3 Penetapan tim

2. Implementasi SDI

- 2.1 Penguatan SDM
 - 2.1.1 Internalisasi
 - 2.1.1.1 Pembentukan tim pelaksana
 - 2.1.1.2 Rapat pembahasan kegiatan
 - 2.1.1.3 Persiapan bahan/materi
 - 2.1.1.4 Menentukan waktu pelaksanaan
 - 2.1.1.5 Undangan
 - 2.1.1.6 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)



Gantt Chart Project Planner

2.1.2 Capacity Building Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Metadata Variabel, Indikator, Kegiatan

2.1.2.1 Pembentukan tim pelaksana

2.1.2.2 Rapat pembahasan kegiatan

2.1.2.3 Koordinasi dengan BPS Pusat

2.1.2.4 Persiapan bahan/materi

2.1.2.5 Menentukan waktu pelaksanaan

2.1.2.6 Undangan

2.1.2.7 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)

2.2 Pembentukan website internal

2.2.1 Pembentukan tim pelaksana (rancangan, programmer)

2.2.2 Rapat pembahasan kegiatan

2.2.3 Pembuatan website

2.2.4 Penetapan operator

2.2.5 Sosialisasi website

2.2.6 Input Data

2.2.7 Maintance website



Gantt Chart Project Planner

3. Pembinaan statistik sektoral dan rekomendasi

- 3.1 Menyusun matrik pembagian tugas/pemetaan dinas OPD/instansi
- 3.2 Menyusun SOP/alur pemberian pembinaan atau coaching clinic statistik sektoral
- 3.3 Menyusun SOP/alur pemberian rekomendasi
- 3.4 Melakukan Coaching Clinic (bimbingan pengetahuan) penyusunan kegiatan dan indikator statistik
- 3.5 Melakukan review dan mengeluarkan rekomendasi

4. Monitoring dan Evaluasi

- 4.1 Penanggung jawab
- 4.2 Pelaporan dan Monitoring kegiatan
- 4.3 Evaluasi kegiatan



Gantt Chart Project Planner

Internal dan Eksternal

1. Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral

1.1 Rapat awal rancangan kegiatan sosialisasi (BPS, Bappeda, Diskominfo)

1.1.1 Pembentukan tim pelaksana

1.1.2 Persiapan bahan/materi

1.1.3 Menentukan waktu pelaksanaan dan peserta

1.1.4 Undangan

1.1.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)

1.2 Pelaksanaan Sosialisasi

1.2.1 Pembentukan tim pelaksana

1.2.2 Persiapan bahan/materi

1.2.3 Menentukan waktu pelaksanaan

1.2.4 Undangan (tanda tangan gubernur)

1.2.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)



Gantt Chart Project Planner

2. Pembentukan Forum Satu Data

- 2.1 Rapat awal pembentukan forum
- 2.2 Pembuatan SK
- 2.3 Pembentukan Forum Satu Data

3. Sosialisasi Forum Satu Data (kaidah Bagi Pakai Data, Satu Metadata, Satu Kode Referensi, dan Satu Standar Data)

- 3.1 Rapat awal rancangan kegiatan
 - 3.1.1 Pembentukan tim pelaksana
 - 3.1.2 Persiapan bahan/materi
 - 3.1.3 Menentukan waktu pelaksanaan dan peserta
 - 3.1.4 Undangan
 - 3.1.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)
- 3.2 Pelaksanaan Sosialisasi
 - 3.2.1 Pembentukan tim pelaksana
 - 3.2.2 Persiapan bahan/materi
 - 3.2.3 Menentukan waktu pelaksanaan
 - 3.2.4 Undangan (tanda tangan gubernur)
 - 3.2.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)



Gantt Chart Project Planner

4. Knowledge sharing (berbagi pengetahuan) kegiatan dan indikator statistik

4.1 Rapat awal rancangan kegiatan

4.1.1 Pembentukan tim pelaksana

4.1.2 Persiapan bahan/materi

4.1.3 Menentukan waktu pelaksanaan dan peserta

4.1.4 Undangan

4.1.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)

4.2 Pelaksanaan Sosialisasi

4.2.1 Pembentukan tim pelaksana

4.2.2 Persiapan bahan/materi

4.2.3 Menentukan waktu pelaksanaan

4.2.4 Undangan (tanda tangan gubernur)

4.2.5 Pelaksanaan (notulen, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan)

4.3. Pembentukan Liaison Officer (LO)



Gantt Chart Project Planner

5. Penyusunan Aplikasi Entri Metadata (variabel, indikator, kegiatan)

- 5.1 Pembentukan tim pelaksana (rancangan, programmer)
- 5.2 Rapat pembahasan kegiatan
- 5.3 Pembuatan program entri
- 5.4 Penetapan operator
- 5.5 Sosialisasi aplikasi
- 5.6 Input Data
- 5.7 Maintance aplikasi
- 5.8 Monitoring dan Evaluasi

6. Penyusunan Aplikasi Sistem Satu Data (backend dan frontend interface)

- 6.1 Pembentukan tim pelaksana (rancangan, programmer)
- 6.2 Rapat pembahasan kegiatan
- 6.3 Pembuatan program entri
- 6.4 Penetapan operator
- 6.5 Sosialisasi aplikasi
- 6.6 Input Data
- 6.7 Maintance aplikasi
- 6.8 Monitoring dan Evaluasi



Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Sumber : GSBPM

Identifikasi Kebutuhan

- Mengidentifikasi kebutuhan
- Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
- Menentukan tujuan
- Identifikasi konsep dan definisi
- Memeriksa ketersediaan data
- Membuat proposal kegiatan (Term Of Reference)

Rancangan

- Merancang output
- Merancang deskripsi variabel
- Merancang pengumpulan data
- Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- Mendesain *sampling*
- Merancang pengolahan dan analisis
- Merancang sistem dan alur kerja



Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Sumber : GSBPM

Implementasi Rancangan

Membuat instrumen
pengumpulan data
(kuesioner)

Membangun komponen
diseminasi

Memastikan alur kerja
berjalan dengan baik

Menguji sistem, instrumen,
dan proses bisnis statistik

Finalisasi sistem

Pengumpulan

Membangun kerangka
sampel dan pemilihan
sampel

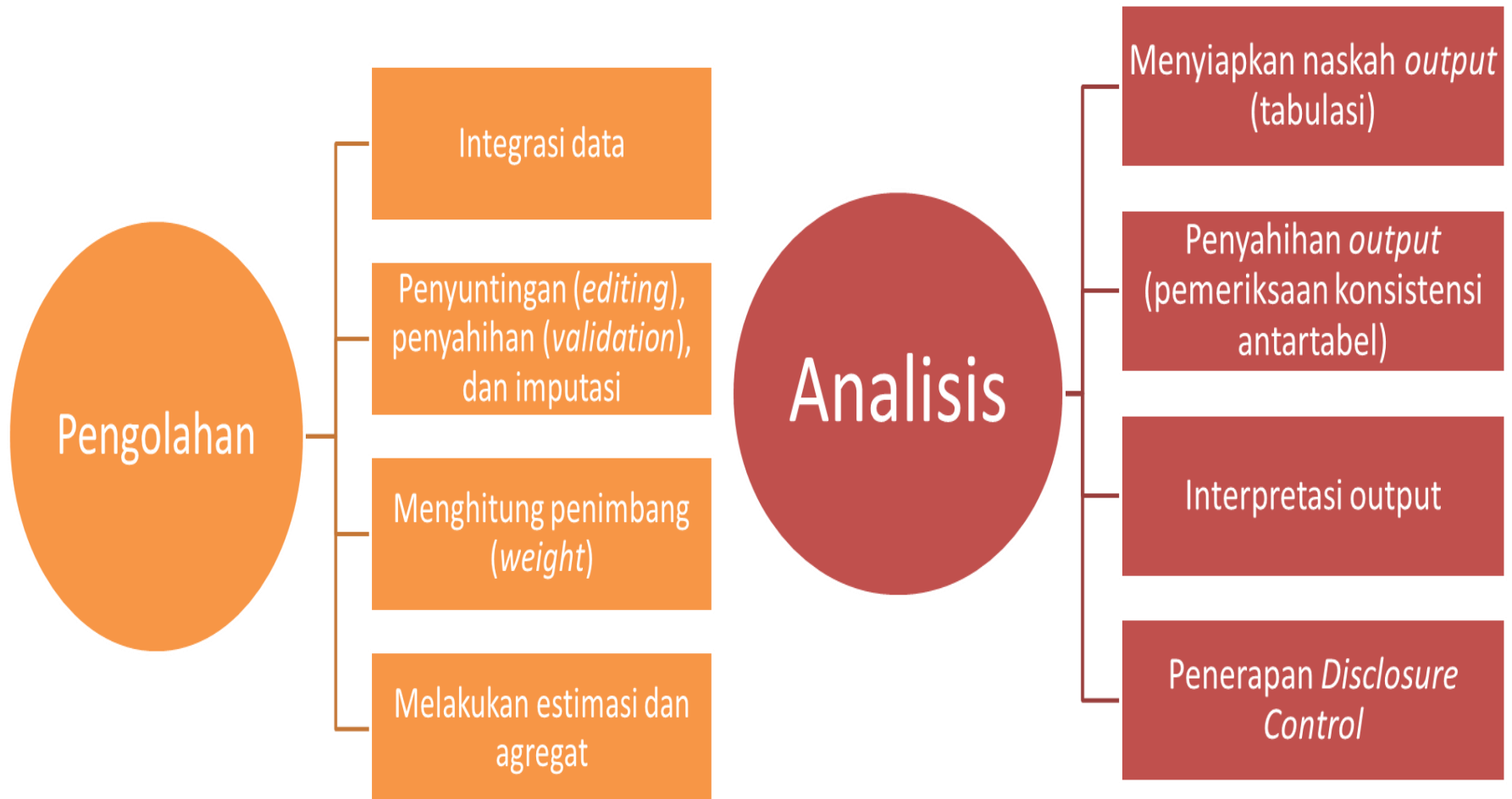
Mempersiapkan
pengumpulan data melalui
pelatihan petugas

Melakukan pengumpulan
data



Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

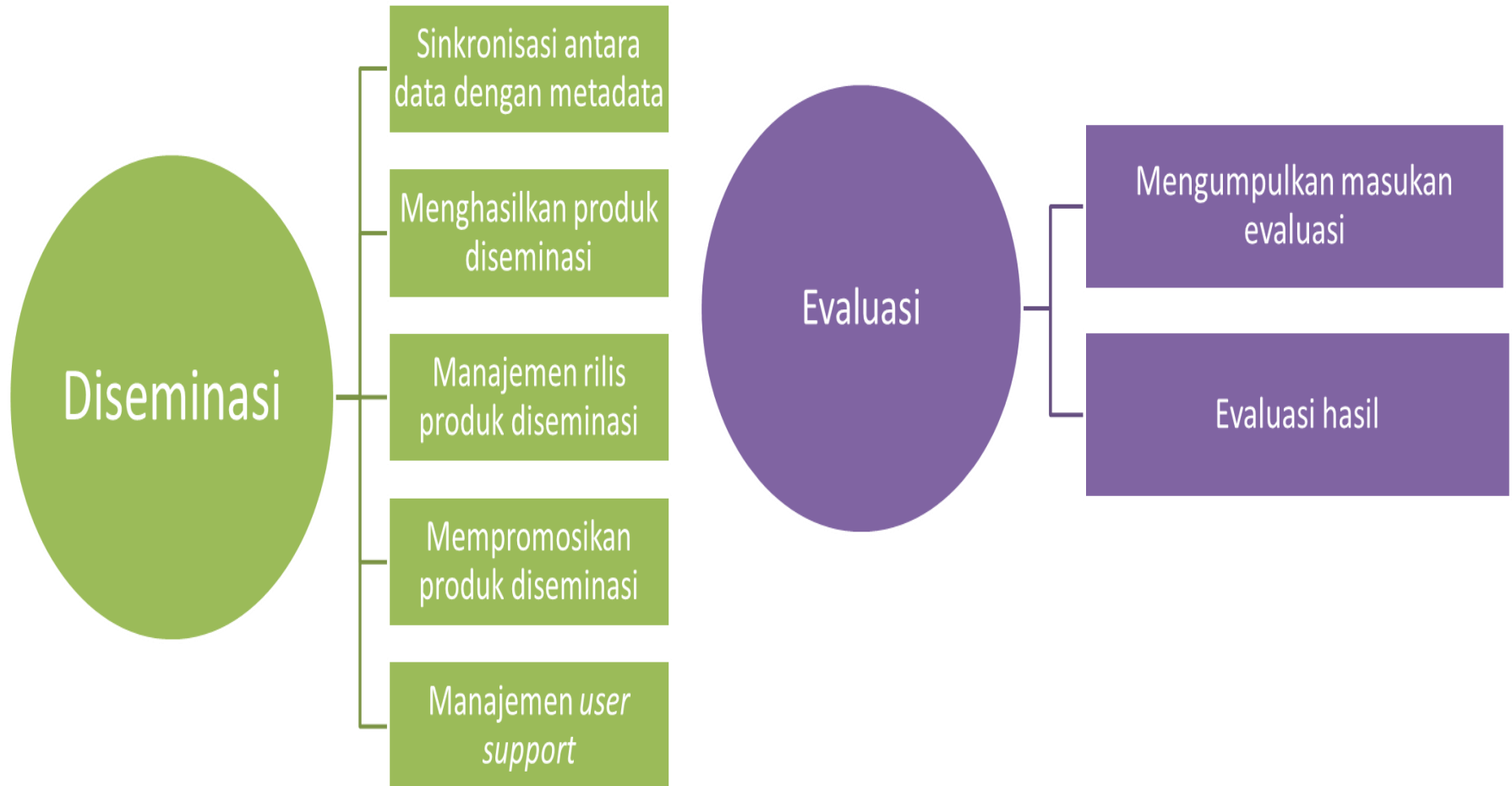
Sumber : GSBPM





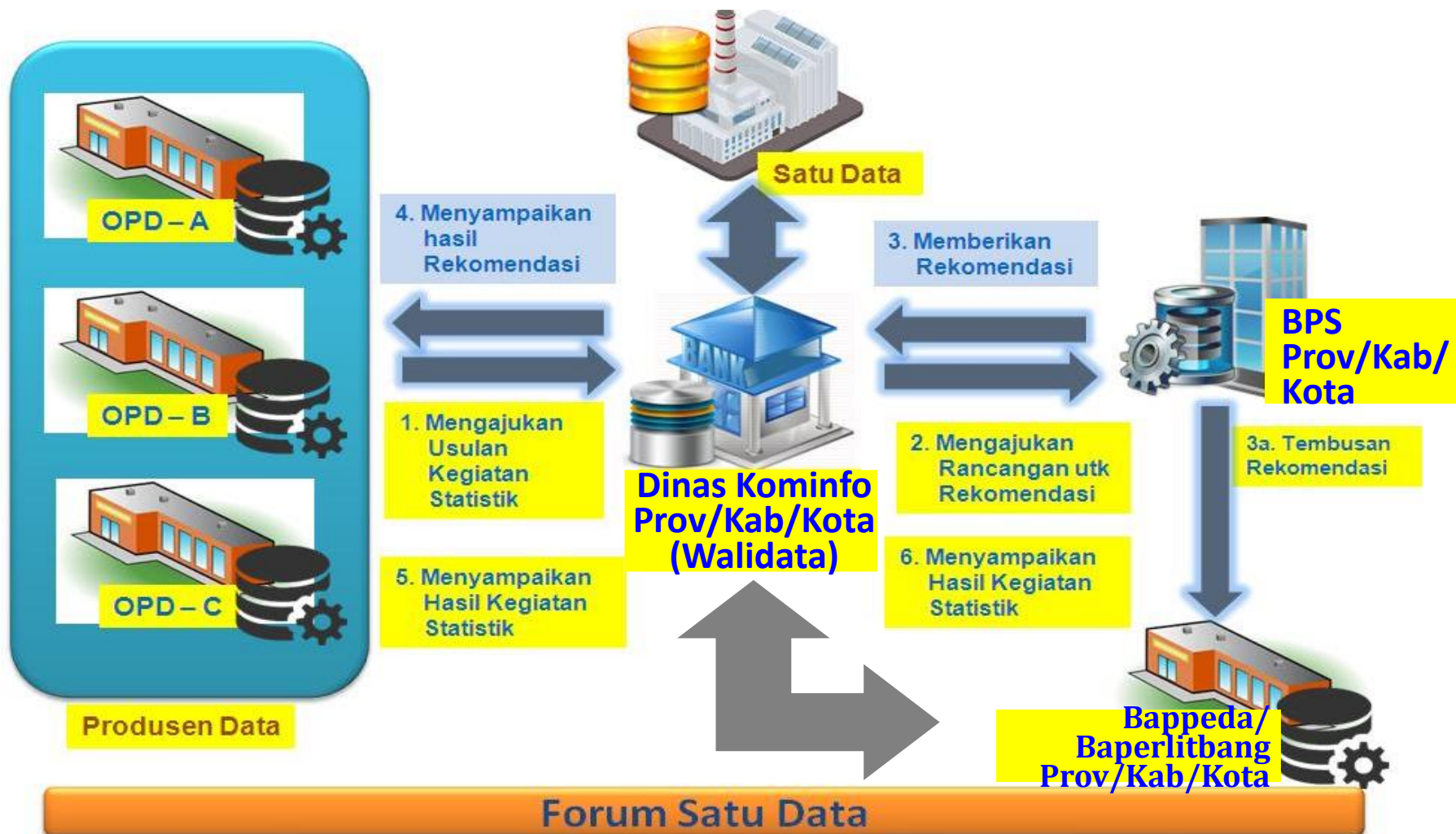
Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Sumber : GSBPM





Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah





Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik Sektor

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

? Mengapa perlu

- Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun *database* metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

? Siapa yang wajib

K/L/I/D yang kegiatan surveinya:

dilaksanakan sendiri

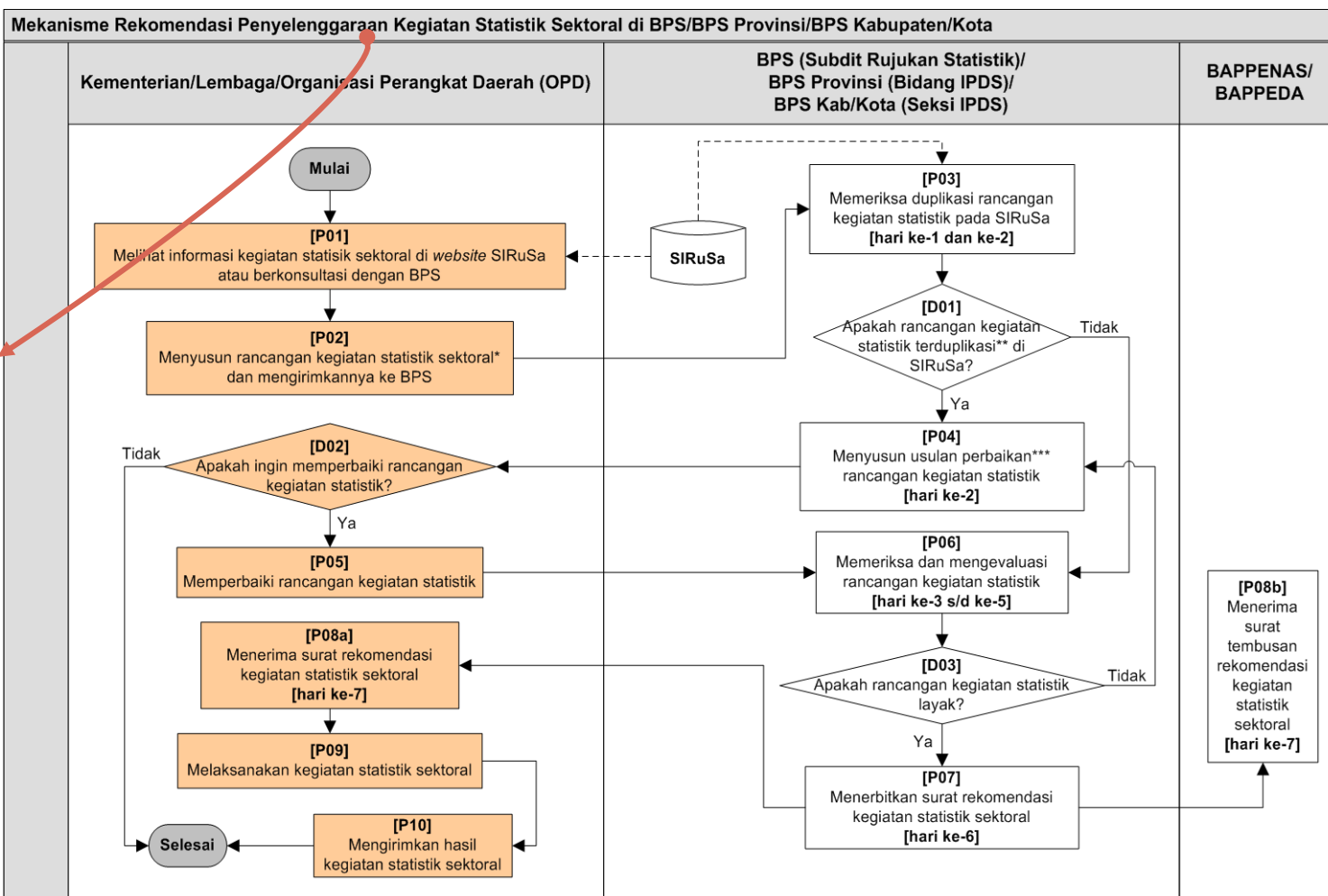
disubkontrakkan kepada pihak lain (konsultan)

dipublikasi untuk umum



Mekanisme Rekomendasi

OPD yang
memiliki
wewenang
untuk
urusan
statistik





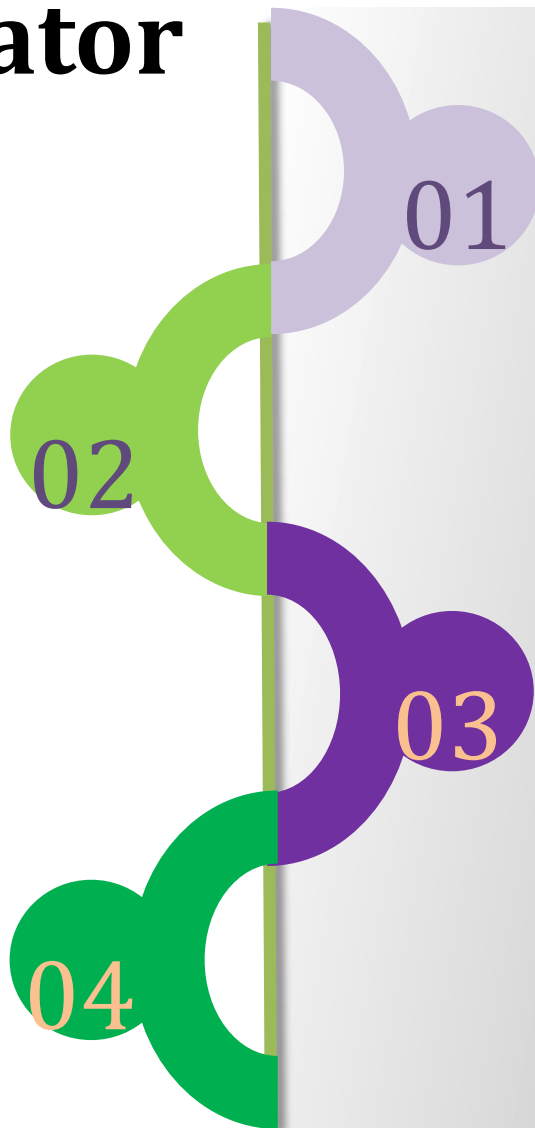
**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Penyedia
Data Statistik
Berkualitas
Untuk Indonesia Maju**

Indikator Statistik



Indikator



KBBI

- sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan

WHO

- simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai

Wilson dan Sapanuchard

- suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi

Green

- variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan



Validity

Relevance

Predictive

Goal Driven

Coverage

Understandable

S
Y
A
R
A
T

I
N
D
I
K
A
T
O
R

Measurable

Reliability

Accessibility/Availability

Timely

Responsive



Data Absolut

Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah absolut/ mutlak suatu obyek atau suatu kejadian/ peristiwa yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu

Ukuran Indikator

Contoh:

- **Jumlah angkatan kerja** merupakan jumlah umur 15 tahun ke atas yang bekerja ditambah jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang pengangguran.
- **Jumlah penerimaan dari wisatawan mancanegara** merupakan jumlah pengeluaran wisman yang mengkonsumsi barang dan jasa selama berada di Indonesia.
- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.



Rasio Perbandingan

Ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara dua bilangan atau dua angka (pembilang/numerator dan penyebut/denominator) yang saling terpisah satu sama lain atau pembilang bukan bagian dari penyebut

Ukuran Indikator

Contoh:

- **Kepadatan penduduk** merupakan rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah.
- **Rasio penumpang per pesawat udara** merupakan rasio total jumlah penumpang yang datang atau berangkat dengan pesawat udara (orang) terhadap total jumlah armada pesawat udara yang datang atau berangkat (unit).
- **Rasio penduduk terhadap mobil penumpang** merupakan perbandingan antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah mobil penumpang.



Proporsi

Ukuran perbandingan antara dua bilangan, dimana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu subgrup populasi dibagi dengan jumlah populasi

**Ukuran
Indikator**

Contoh:

- **Proporsi murid putus sekolah 7-12 tahun** merupakan proporsi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (tamat dan yang tidak tamat).



Persentase

bentuk perbandingan yang dikalikan dengan 100 atau dinyatakan per seratus (persen)

Ukuran
Indikator

Contoh:

- **Angka melek huruf** merupakan perbandingan jumlah penduduk yang melek huruf (15+) terhadap jumlah penduduk (15+) pada tahun ke-t yang dinyatakan dalam persentase.
- **Cakupan imunisasi** merupakan perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk anak usia 1-2 tahun yang diimunisasi lengkap terhadap jumlah anak usia 1-2 tahun pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
- **Tingkat hunian kamar (TPK)** merupakan perbandingan banyaknya malam kamar yang terpakai terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan dengan 100 (dinyatakan dalam persentase).



Ukuran Indikator

indikator atau ukuran yang mengacu pada ukuran statistik dari perubahan yang biasanya dinyatakan dalam angka tanpa satuan

Indeks

Contoh:

- **Indeks Tunggal** : indeks harga, Angka Melek Huruf untuk mengukur kemampuan baca tulis.
- **Indeks Komposit** : Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dari 4 indikator: Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita, dan Angka Harapan Hidup.



Ukuran Indikator

Rate/ Angka/ Tingkat

jumlah kejadian/peristiwa dalam suatu periode tertentu dibagi populasi *at risk* selama periode tersebut

Contoh:

- **CBR (Crude Birth Rate)** pada tahun 2013 di Provinsi XYZ adalah 25, artinya pada tahun 2013 ada 25 kelahiran di Provinsi XYZ tiap 1000 penduduk.
- **ASFR 20-24 (Age Specified Fertility Rate usia 20-24 tahun)** pada tahun 2013 di Provinsi XYZ adalah 0,015, artinya pada tahun 2013 ada 15 kelahiran di provinsi XYZ tiap 1000 wanita subur usia 20-24 tahun.



Kohor adalah sekelompok penduduk yang mempunyai pengalaman waktu yang sama dari suatu peristiwa tertentu.

Prevalensi mengacu pada kejadian pada tahun tertentu.

Insidensi mengacu pada frekuensi kejadian misalnya perkembangan penyakit yang baru dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

**Kohor/
Prevalensi/
incidence**

**Ukuran
Indikator**

Contoh:

- **Kohor** : Kohor kelahiran menggambarkan penduduk di suatu daerah yang lahir pada tahun yang sama.
- **Prevalensi** : prevalensi hipertensi, merupakan jumlah penduduk 18 tahun ke atas yang mengalami hipertensi pada waktu tertentu (termasuk tahun-tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk 18 tahun ke atas (dalam persen).
- **Insidence** : Incidence Rate penyakit TBC di Kenya pada tahun 1996 adalah 97 per 100.000 penduduk, artinya pada tahun 1996 ada 97 (kasus baru) orang menderita TBC tiap 100.000 penduduk Kenya.



Metadata

informasi mengenai data atau data tentang data

Metadata Struktural INDIKATOR

- Konsep/definisi
- Pengukuran/
penghitungan
- Interpretasi

Metadata Deskriptif KEGIATAN

- Cara perolehan
- Penanggung
jawab
- Tujuan



Laju Pertumbuhan Penduduk

KONSEP

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu

- LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk.pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP < 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

dengan:

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
(dalam tahun)

Badan Pusat Statistik (BPS)

Sensus Penduduk, Supas

WALIDATA

SUMBER DATA



Laju Inflasi

KONSEP

Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen. Dalam penghitungan laju inflasi dapat menggunakan inflasi per tahun dan inflasi bulan berjalan.

- Memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
- Sebagai indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil, perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain.
- Menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan.

- Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota pada Februari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 127,94 pada Januari 2017 menjadi 128,24 pada Februari 2017.

Artinya pada bulan februari 2017 terjadi kenaikan indeks harga konsumen sebesar 0,23 persen.

$$\text{Inf}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$$

atau

$$\text{Inf}_n = \left(\frac{\text{IHK}_n}{\text{IHK}_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

dengan:

Inf_n : inflasi tahun n

IHK_n : indek harga konsumen thn ke n

IHK_{n-1} : indek harga konsumen thn n-1

Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks/Persen

Survei Harga Konsumen

WALIDATA

UKURAN

SUMBER DATA

M
A
N
F
A
T

P
I
N
T
E
R
S
I

R
U
M
U
S



Rasio Pemukiman Layak Huni

KONSEP

Rasio pemukiman layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan.

Manfaat

Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas pemukiman yang layak huni.

Interpretasi

Makin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah tersebut menyediakan pemukiman yang layak huni, oleh karenanya semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

Rumus

Rasio Pemukiman Layak Huni

$$= \frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah pemukiman}}$$

Walidata

Kementerian PU

Ukuran

Indeks/Persen

Sumber Data

Kementerian PU dan DDA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Penyedia
Data Statistik
Berkualitas
Untuk Indonesia Maju**

Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah



Tujuan Forum Satu Data

1 Wadah Komunikasi

sebagai bentuk koordinasi penyelenggara kegiatan statistik

- Identifikasi dan analisis kebutuhan data
- Koordinasi penyediaan data
- Penyamaan persepsi tentang interpretasi data
- Peningkatan komitmen penyediaan data berkualitas dan tepat waktu

2 Data dan Informasi

Tersedianya data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terpadu

3 Kebutuhan dan Ketersediaan Data

Tidak terjadi kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia

4 Pemanfaatan Data

Mendorong pemerintahan daerah dalam memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik



Karakteristik

Dibentuk berdasarkan
**SK Gubernur/
Bupati/Walikota**

Merupakan **wadah
komunikasi data dan
informasi pembangunan
daerah lintas sektor**

Dibiayai oleh APBD serta
cost sharing dari berbagai
OPD dan instansi vertikal

**Forum penyedia data dan informasi
untuk perencanaan pembangunan di
provinsi/kab/kota**

Jejaring antar OPD dalam penyediaan
data dan informasi untuk
penyempurnaan implementasi
kebijakan otonomi daerah

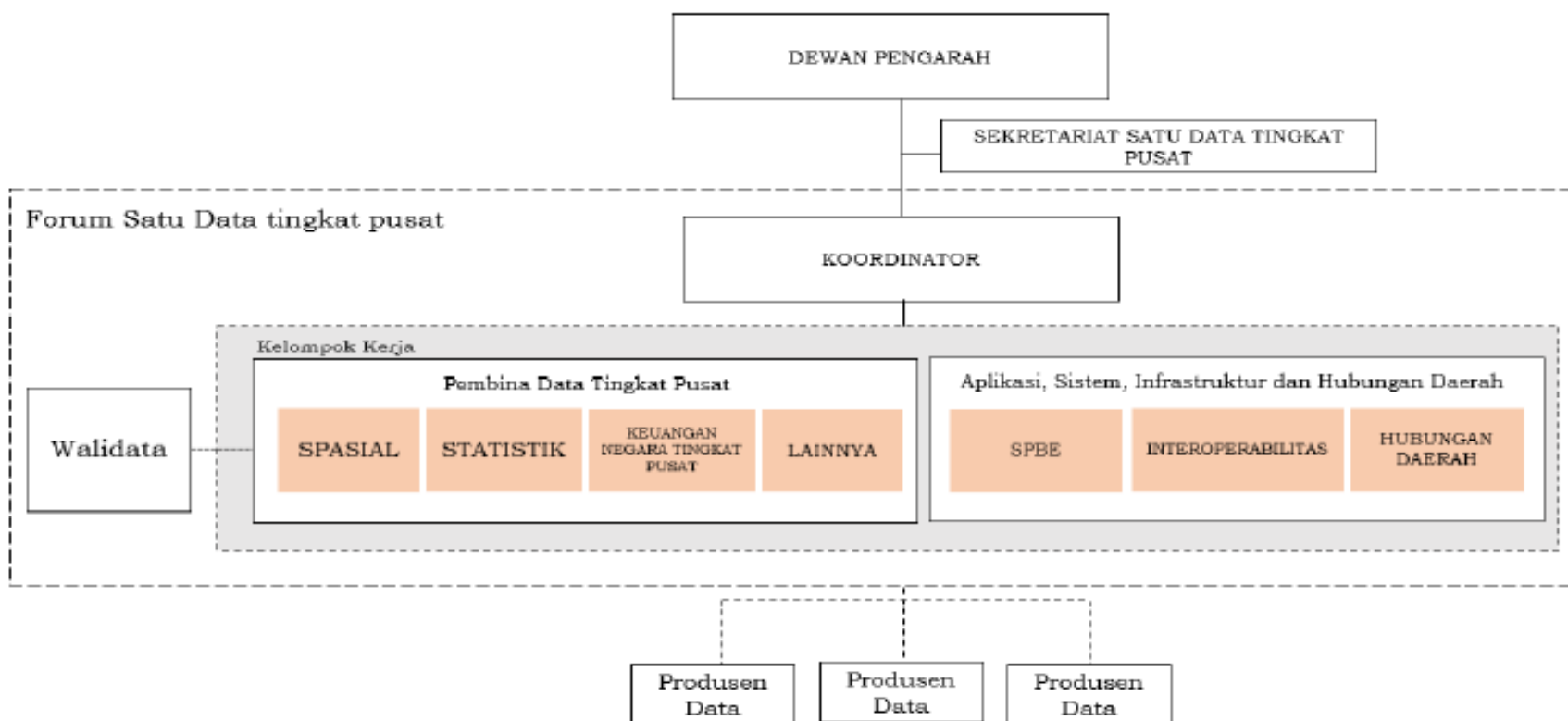
**Anggota seluruh OPD dan instansi
vertikal** di provinsi/kab/kota

Kelembagaan dan keanggotaan forum
bersifat permanen

Ruang Lingkup

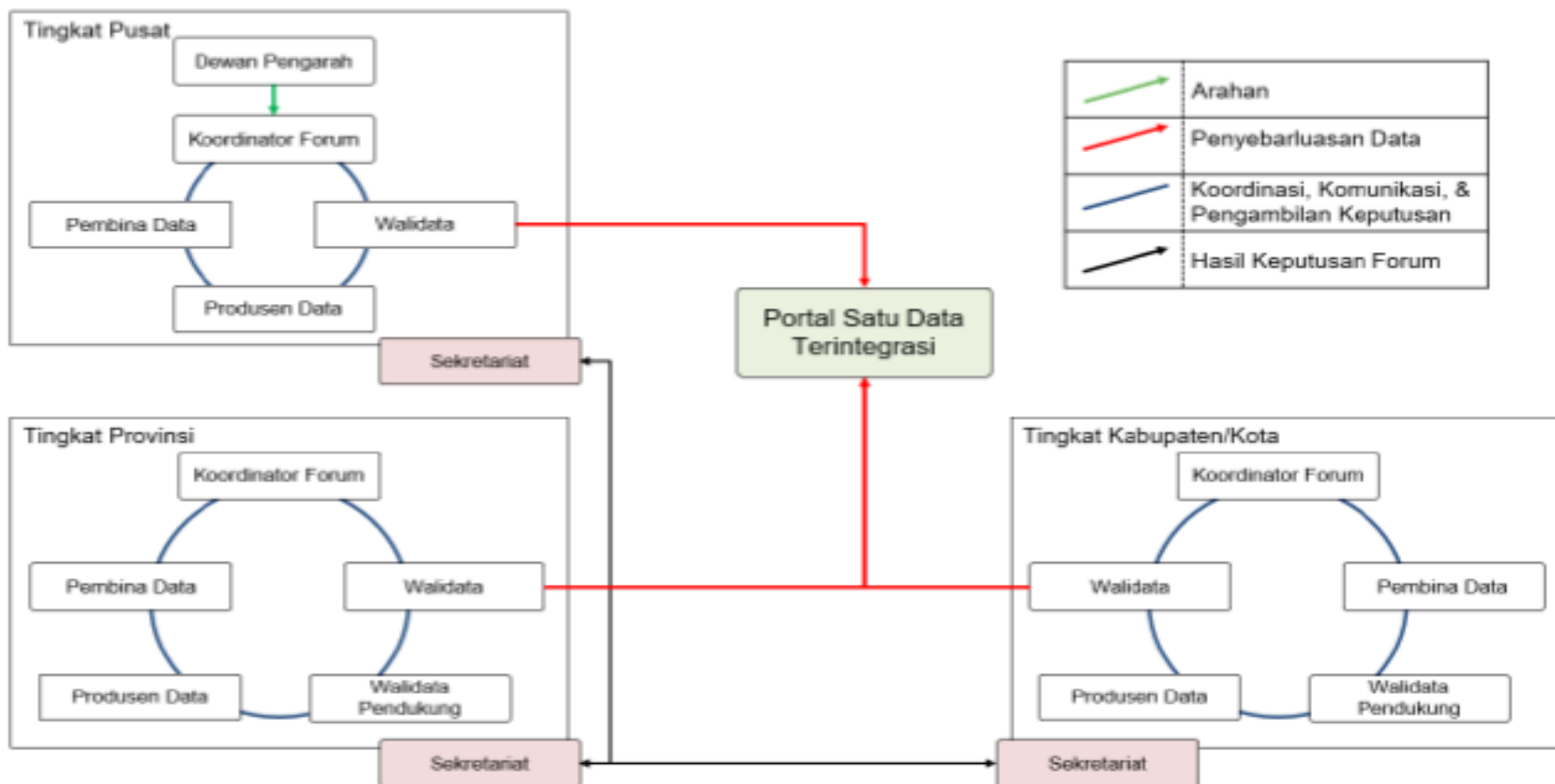


STUKTUR KELEMBAGAAN FORUM SATU DATA (Permen Bappenas 18/2020)





PORTAL SATU DATA (Permen Bappenas 18/2020)





Pengelolaan Kegiatan Forum Satu Data

1

Perencanaan

Identifikasi kesenjangan data, menetapkan prioritas, membuat *workplan*, serta menyusun Renja kebutuhan anggaran Forum Satu Data

2

Pelaksanaan

Koordinasi, advokasi dan fasilitasi pengembangan Forum Satu Data, dan pemantauan/ evaluasi dalam pengelolaan Forum Satu Data

3

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4

Pembiayaan

APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan *cost sharing* dari berbagai pemangku kepentingan



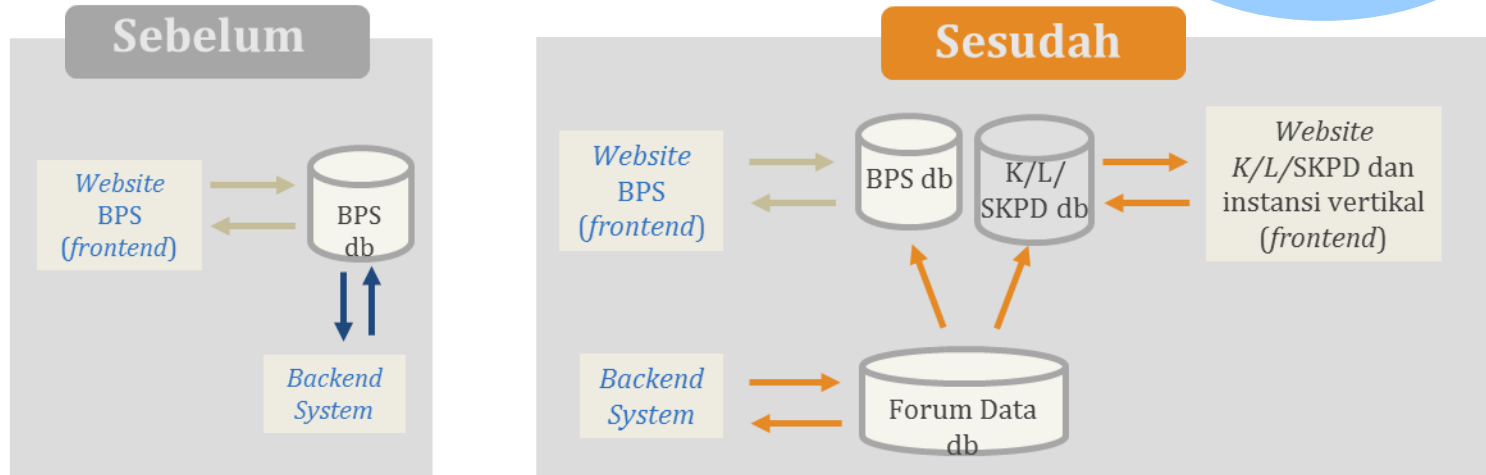
**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Penyedia
Data Statistik
Berkualitas
Untuk Indonesia Maju**

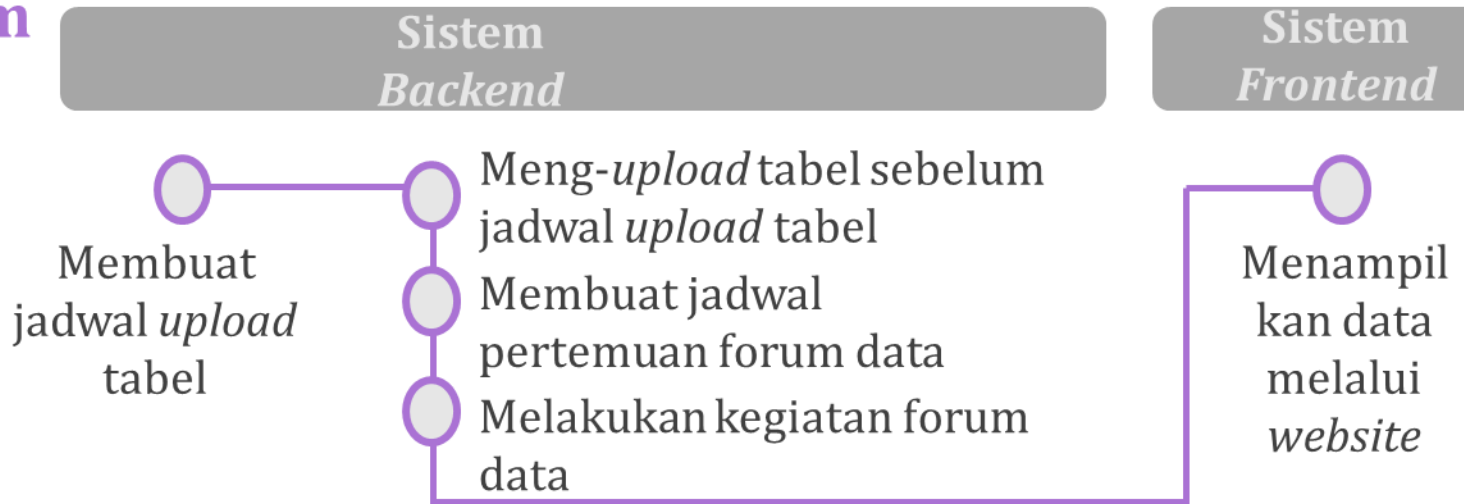
Aplikasi Sistem Satu Data



Grand Design



Alur Sistem



Menu Administrator

[Beranda](#) » [Logo](#) **OPD**

Wilayah: {Update Nama Wilayah} 



Logo OPD

Operations

- Penanggungjawab Web
- Daftar OPD
- Hak Akses Subjek

1. Upload Logo K/L/OPD
2. Lokasi forum satu data (prov/kab/kota)
3. Pendaftaran *Liaison Officer* (LO) K/L/OPD
4. Hak akses K/L/OPD sesuai data dan metadata K/L/OPD



Menu Pengelolaan Forum Satu Data

[Beranda](#) » [Forum Data](#) » [Jadwal Pertemuan Forum Data](#)

Kelola Forum Data

[Tambah Jadwal Forum Data](#)

[Cari...](#)

Tanggal Forum	Judul rapat	Tempat	Alamat	Undangan	Notulensi	Tambah Indikator	Edit
---------------	-------------	--------	--------	----------	-----------	------------------	------

1. Penentuan jadwal, tempat kegiatan, dan notulensi forum data
2. Input indikator yang akan dibahas pada kegiatan forum data
3. Input metadata indikator sektoral (tersimpan pada sirusa.bps.go.id)



Menu Tabel Dinamis

Beranda » Tabel Dinamis

Kelola Daftar Tabel  Kelola Data 

INPUT DATA

Subjek :

Variabel :

[\[Tampilkan Detail Variabel\]](#)

Tahun :

File Upload : No file selected.

1. Input data (transformasi dari format xls dengan 4 model *template* ke SQL)
2. Update dan delete data
3. Link table dinamis (query data)



Menu Verifikasi Data

Beranda » Forum Data » Verifikasi Data			
Verifikasi Data			
[tampilkan menu pencarian]			
Menampilkan 1-6 dari 6 hasil			
Judul Tabel	Tanggal Upload	Tanggal Forum	Verifikasi

1. Menampilkan data yang akan diverifikasi dalam bentuk tabel
2. Verifikasi data (indikator) : (a) Forum Menyetujui; (b) Forum Mengkaji Ulang; dan (c) Forum Menolak



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Penyedia
Data Statistik
Berkualitas
Untuk Indonesia Maju**

TERIMA KASIH

